

---

# LAPORAN KEUANGAN

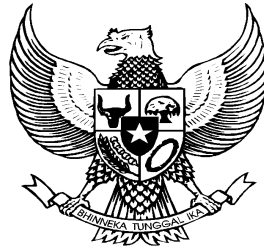
**PER 31 DESEMBER 2019**

---



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

*AUDITED*



**WALIKOTA MADIUN**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Daerah (LKD) *audited* yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Semua informasi dalam laporan keuangan ini telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan ini tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

**WALIKOTA MADIUN**

**Drs.H.MAIDI,SH,MM,M.Pd**

## KATA PENGANTAR

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 38, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) *audited* Tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun.

LKD *audited* Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 menyajikan informasi kepada para pengguna (*stakeholder*) mengenai aset, kewajiban, kekayaan bersih, realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi kas daerah Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2019.

Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun tahun 2019 merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada para pengguna (*stakeholder*) sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

**WALIKOTA MADIUN**

**Drs.H.MAIDI,SH,MM,M.Pd**

# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN</b>		<b>1</b>
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN		1
2. LAPORAN PERUBAHAN SAL		2
3. NERACA		3
4. LAPORAN OPERASIONAL		3
5. LAPORAN ARUS KAS		5
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		6
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		7
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I - 1</b>
1.1	Latar belakang	I - 1
1.2	Maksud & Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	I - 2
1.3	Dasar Penyusunan	I - 3
1.4	Sistematika Penulisan	I - 4
<b>BAB II</b>	<b>PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD</b>	<b>II - 1</b>
2.1	Perkembangan Ekonomi Makro	II - 1
2.1.1	Rencana Target Ekonomi	II - 1
2.1.2	Produk Domestik Regional Bruto	II - 3
2.1.3	Inflasi	II - 5
2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	II - 6
2.1.5	Kemiskinan	II - 7
2.1.6	Indek Pembangunan Manusia	II - 8
2.1.7	Rencana Target Ekonomi Makro Kota Madiun 2016	II - 8
2.2	Kebijakan Keuangan	II - 10
2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	II - 10
2.2.1.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	II - 10
2.2.1.2	Target Pendapatan Daerah	II - 11

2.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	II - 19
2.2.2.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	II - 19
2.3	Target Kinerja APBD	II - 20
2.3.1	Urusan Wajib	II - 20
2.3.2	Urusan Pilihan	II - 21
2.3.3	Urusan Penunjang	II - 21
2.3.4	Target Kinerja Keuangan SKPD	II - 21
<b>BAB III</b>	<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	<b>III - 1</b>
3.1	Urusan Wajib	III - 1
3.2	Urusan Pilihan	III - 2
3.3	Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	III - 2
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	<b>IV- 1</b>
4.1	Entitas Laporan Keuangan Daerah	IV- 1
4.2	Basis Akuntansi	IV- 1
4.3	Basis Pengukuran	IV- 2
4.4	Penetapan Kebijakan Akuntansi	IV- 2
<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS POS REALISASI ANGGARAN</b>	<b>V-1</b>
5.1	Pendapatan	V-1
5.1.1	Pendapatan Asli Daerah	V-1
5.1.1.1	Pajak Daerah	V-2
5.1.1.2	Retribusi Daerah	V-8
5.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	V-20
5.1.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	V-22
5.1.2	Pendapatan Transfer	V-32
5.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	V-32
5.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	V-33
5.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	V-34

5.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	V-36
5.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	V-36
5.1.2.1.5	Bagi Hasil Cukai	V-38
5.1.2.2	Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya	V-38
5.1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	V-38
5.1.2.2.2	Dana Penyesuaian	V-39
5.1.2.3	Tranfer Pemerintah Propinsi	V-39
5.1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Propinsi/ Pemerintah Lainnya	V-40
5.1.3	Lain Lain Pendapatan Yang Sah	V-44
5.1.3.1	Pendapatan Dana Hibah	V-45
5.2	Belanja	V-46
5.2.1	Belanja Operasi	V-46
5.2.1.1	Belanja Pegawai	V-46
5.2.1.1.1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	V-48
5.2.1.1.2	Belanja Pegawai Langsung	V-50
5.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	V-52
5.2.1.3	Belanja Hibah	V-57
5.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	V-58
5.2.2	Belanja Modal	V-60
5.2.2.1	Belanja Modal Tanah	V-61
5.2.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	V-61
5.2.2.3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	V-63
5.2.2.4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	V-65
5.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V-66
5.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	V-67
5.2.3	Belanja Tidak Terduga	V-69
5.2.3.1	Belanja Tidak Terduga	V-69
5.2.4	Belanja Tranfer	V-70
5.2.4.1	Belanja Tranfer Bantuan Keuangan	V-70

5.3	Pembiayaan	V-71
5.3.1	Penerimaan Pembiayaan	V-71
5.3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	V-71
5.3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	V-72
5.3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	V-72
5.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	V-72
5.3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V-72
5.3.2.2	Pembayaran pokok utang	V-72
<b>BAB VI</b>	<b>PENJELASAN POS POS PERUBAHAN SAL</b>	<b>VI- 1</b>
6.1	SAL Awal	VI -1
6.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	VI -1
6.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan	VI -2
6.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	VI -2
6.5	SAL Akhir	VI -2
<b>BAB VII</b>	<b>PENJELASAN POS-POS NERACA</b>	<b>VII- 1</b>
7.1.	Aset	VII- 1
7.1.1	Aset Lancar	VII- 2
7.1.1.1	Kas dan Bank	VII- 3
7.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	VII- 3
7.1.1.1.2	Deposito	VII- 3
7.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	VII- 4
7.1.1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	VII- 5
7.1.1.1.5	Kas di BLUD RSUD	VII- 5
7.1.1.1.6	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	VII- 6
7.1.1.1.7	Kas Lainnya	VII- 7
7.1.1.2	Piutang Pajak Daerah	VII- 8

7.1.1.3	Piutang Retribusi Daerah	VII- 10
7.1.1.4	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	VII-13
7.1.1.5	Piutang Lain - Lain	VII-14
7.1.1.5.1	Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir	VII-16
7.1.1.5.2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	VII-17
7.1.1.5.3	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha BUMD	VII-18
7.1.1.5.4	Piutang Klaim BLUD	VII-20
7.1.1.6	Persediaan	VII- 22
7.1.1.7	Belanja Dibayar Dimuka	VII- 24
7.1.2	Investasi jangka panjang	VII- 25
7.1.2.1	Investasi Non Permanen	VII- 25
7.1.2.1.1	Investasi Dana Bergulir	VII- 25
7.1.2.1.2	Penyisihan Dana Bergulir	VII- 30
7.1.2.2	Investasi Permanen	VII- 31
7.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemda	VII- 31
7.1.3	Aset Tetap	VII- 45
7.1.3.1	Tanah	VII- 46
7.1.3.2	Peralatan dan Mesin	VII- 49
7.1.3.3	Gedung dan Bangunan	VII- 54
7.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	VII- 60
7.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	VII- 65
7.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	VII- 70
7.1.4	Aset Lainnya	VII- 75
7.1.4.1	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	VII-76
7.1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	VII-76
7.1.4.2.1	Bangun Guna Serah (BOT)	VII-76
7.1.4.2.2	Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	VII- 77
7.1.4.4	Aset Tidak Berwujud	VII- 79
7.1.4.5	Aset Lain - Lain	VII- 84
7.2.	Utang	VII- 90



7.2.1	Utang Lancar	VII- 90
7.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	VII- 90
7.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	VII- 90
7.2.1.3	Utang Belanja	VII- 92
7.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	VII- 93
7.2.2	Utang Jangka Panjang	VII- 94
7.3.	Ekuitas	VII- 94
7.3.1	Ekuitas	VII- 94

**BAB VIII PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL** VIII - 1

8.1.	Pendapatan LO	VIII - 1
8.1.1	Pendapatan Asli Daerah LO	VIII - 2
8.1.1.1	Pajak Daerah LO	VIII - 3
8.1.1.2	Retribusi Daerah LO	VIII - 6
8.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	VIII -18
8.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO	VIII -20
8.1.2	Pendapatan Transfer LO	VIII -26
8.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan LO	VIII-27
8.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak LO	VIII-28
8.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA LO	VIII-29
8.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) LO	VIII- 31
8.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) LO	VIII- 32
8.1.2.1.5	Dana Bagi Hasil Cukai LO	VIII-35
8.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO	VIII- 36
8.1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus LO	VIII- 36
8.1.2.2.2	Dana Penyesuaian LO	VIII- 37
8.1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi LO	VIII- 38
8.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak LO	VIII- 38
8.1.2.3.2	Dana Bagi Hasil Lainnya LO	VIII-40
8.1.2.3.2.1	Bantuan Keuangan Dari Propinsi LO	VIII-41

8.1.3	Lain Lain Pendapatan Yang Sah LO	VIII-45
8.1.3.1	Pendapatan Dana Hibah LO	VIII-46
8.1.3.2	Pendapatan Darurat LO	VIII-48
8.1.3.3	Pendapatan Lainnya LO	VIII-48
8.2	Beban Operasi	VIII-49
8.2.1	Beban Pegawai	VIII-50
8.2.1.1	Beban Pegawai Tidak Langsung	VIII-51
8.2.1.2	Beban Pegawai Langsung	VIII-53
8.2.1.3	Beban Pegawai BLUD	VIII-55
8.2.1.4	Beban Pegawai BOS	VIII-56
8.2.2	Beban Persediaan	VIII-57
8.2.3	Beban Jasa	VIII-58
8.2.4	Beban Pemeliharaan	VIII-58
8.2.5	Beban Perjalanan Dinas	VIII-59
8.2.6	Beban Bunga	VIII-60
8.2.7	Beban Subsidi	VIII-60
8.2.8	Beban Hibah	VIII-61
8.2.9	Beban Bantuan Sosial	VIII-62
8.2.10	Beban Tranfer	VIII-63
8.2.11	Beban Penyisihan Piutang	VIII-63
8.2.12	Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen	VIII-64
8.2.13	Beban Penyusutan Aset Tetap	VIII-64
8.2.14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	VIII-65
8.2.15	Beban Lain-Lain	VIII-66
8.3.1	Beban Tidak Terduga	VIII-69
<b>BAB IX</b>	<b>PENJELASAN POS-POS ARUS KAS</b>	<b>IX - 1</b>
9.1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	IX - 1
9.1.1	Arus Kas Masuk	IX - 1

9.1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	IX - 1
9.1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	IX - 4
9.1.1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	IX - 14
9.1.1.4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	IX - 16
9.1.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	IX - 20
9.1.1.6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	IX - 21
9.1.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	IX - 21
9.1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	IX - 22
9.1.1.9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai	IX - 22
9.1.1.10	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	IX - 23
9.1.1.11	Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi	IX - 23
9.1.1.12	Penerimaan Dana Penyesuaian	IX - 24
9.1.1.13	Penerimaan hibah	IX - 25
9.1.2	Arus Kas Keluar	IX - 25
9.1.2.1	Pembayaran Pegawai	IX - 25
9.1.2.2	Pembayaran Barang dan Jasa	IX - 28
9.1.2.3	Pembayaran Hibah	IX - 30
9.1.2.4	Pembayaran Bantuan Sosial	IX - 32
9.1.2.5	Pembayaran Bantuan Keuangan	IX - 33
9.1.2.6	Pembayaran Tidak Terduga	IX - 34
9.1.3	Arus Kas bersih dari aktifitas operasi	IX - 36
9.2	Arus Kas Dari Aktifitas Investasi	IX - 36
9.2.1	Arus Kas Masuk	IX - 37
9.2.1.1	Penjualan Investasi Jangka Panjang	IX - 37
9.2.1.2	Penjualan Aktifa Tetap	IX - 37
9.2.2	Arus Kas Keluar	IX - 37
9.2.2.1	Perolehan Modal Tanah	IX - 37
9.2.2.2	Perolehan Modal Peralatan Dan Mesin	IX - 37

9.2.2.3	Perolehan Modal Gedung Dan Bangunan	IX - 39
9.2.2.4	Perolehan Modal Jalan Irigasi Bangunan	IX - 39
9.2.2.5	Perolehan Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya	IX - 40
9.2.2.6	Perolehan Modal Aset Lainnya	IX - 41
9.2.2.7	Penyertaan Modal	IX - 42
9.2.3	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investas	IX - 42
9.3	Arus Kas Dari Aktifitas Pendanaan	IX - 43
9.3.1	Arus Kas Masuk	IX - 43
9.3.3.1.1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	IX - 43
9.3.2	Arus Kas Keluar	IX - 43
9.3.2.1	Penyertaan Modal Pemda	IX - 43
9.3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	IX - 44
9.3.3	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	IX - 44
9.4	Arus Kas dari Aktifitas Transitoris	IX - 45
9.4.1	Arus Kas Masuk	IX - 45
9.4.1.1	Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga (PFK) dan sisa UP	IX- 45
9.4.2	Arus Kas Keluar	IX- 46
9.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK)	IX- 46
9.4.3	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris	IX- 46
9.5	Kenaikan (Penurunan) Kas	IX- 47
9.6	Saldo Akhir Kas	IX- 47
 <b>BAB X PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>		<b>X - 1</b>
10.1.	Ekuitas Awal	X - 1
10.2.	Surplus (Defisit) LO	X - 1
10.3.	Lain-lain	X - 2
10.4.	Ekuitas Akhir	X -11

<b>BAB XI</b>	<b>PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN</b>	<b>XI - 1</b>
11.1	Gambaran Umum Pemerintah Kota Madiun	XI - 1
11.1.1	Keadaan Geografis	XI - 1
11.1.2	Kondisi Demografis	XI - 2
11.1.3	Potensi Unggulan Daerah	XI - 2
11.2	Organisasi	XI - 2

**LAMPIRAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD TAHUN 2019**

Lampiran 1	Ikhtisar Laporan Keuangan PDAM Kota Madiun Tahun 2019	
Lampiran 2	Ikhtisar Laporan Keuangan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun Tahun 2019	
Lampiran 3	Ikhtisar Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha Tahun 2019	